

Implementasi Tata Kelola Pelayanan Kepegawaian Bagi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) SMA Kabupaten Karawang di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat

Destiani Nuraeni¹, Sayan Suryana², Ceceng Syarif Husein³

^{1,2,3} Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam,
Universitas Singaperbangsa Karawang

e-mail: 1910631120019@student.unsika.ac.id¹,
sayan.suryana@fai.unsika.ac.id², ceceng.syarief@unsika.ac.id³

Abstrak

Implementasi tata kelola pelayanan kepegawaian bagi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) SMA Kabupaten Karawang di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat merupakan satu langkah penting untuk memastikan bahwa proses pengelolaan pelayanan pegawai pendidikan berjalan efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Januari hingga bulan Agustus 2023. Berlokasi di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat, yang beralamat di Jl. KK. Singawinata No. 57 Kabupaten Purwakarta.. Metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bersifat kualitatif sedangkan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini bahwa (1) Adanya Guru Pendidikan Agama Islam SMA Kabupaten Karawang di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat merupakan alih kelola peraturan pemerintah daerah, yang kewenangannya berada pada Dinas Pendidikan Jawa Barat. (2) Guru Pendidikan Agama Islam berada pada dua naungan yaitu Departemen Agama dan Departemen Pendidikan. sistem informasi yang digunakan oleh Dinas Pendidikan berupa TRK, Kmob, Siap Jabar dan Siaga Pendis. (3) Tunjangan yang didapatkan berada pada dua naungan juga yaitu Departemen Agama dan Departemen Pendidikan, tunjangan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan berupa gaji pokok, tunjangan fungsional, dan tambahan penghasilan pegawai, sedangkan tunjangan yang diberikan oleh Kemetrian Agama berupa tunjangan sertifikasi. (4) Dari segi evaluasi terdapat keluhan dan saran, disimpulkan bahwa beberapa Guru Pendidikan Agama Islam mengatakan cukup optimal terkait pelayanan kepegawaian, yaitu GPAI SMAN 2 Karawang, GPAI SMAN 3 Karawang dan GPAI SMAN 5 Karawang. Sedangkan mereka yang menyatakan belum optimal terhadap pelayanan kepegawaian adalah GPAI SMAN 1 Telukjambe dan GPAI SMAN 4 Karawang.

Kata kunci: *Pelayanan Kepegawaian, Guru Pendidikan Agama Islam, Dinas Pendidikan*

Abstract

The implementation of personnel service governance for Islamic Religious Education Teachers (GPAI) SMA Karawang District at the West Java Region IV Education Office Branch Office is an important step to ensure that the process of managing education employee services runs effectively, efficiently, transparently, and in accordance with applicable regulations . This research was carried out from January to August 2023. It is located at the West Java Region IV Education Office Branch Office, which is located at Jl. KK. Singawinata No. 57 Purwakarta Regency. The research method to be used is qualitative research with a qualitative descriptive approach while data collection techniques are in-depth interviews, observation, and documentation. The results of this study are that (1) The presence of Islamic Religious Education Teachers for High Schools in Karawang Regency in

the West Java Region IV Education Office Branch is a transfer of management of local government regulations, whose authority lies with the West Java Education Office. (2) Islamic Religious Education teachers are under two auspices, namely the Ministry of Religion and the Ministry of Education. the information system used by the Education Office is in the form of TRK, Kmob, Ready West Java and Siaga Pendis. (3) The benefits received are also under two auspices, namely the Ministry of Religion and the Ministry of Education. The allowances provided by the Education Office are in the form of basic salary, functional allowances, and additional employee income, while the allowances provided by the Ministry of Religion are in the form of certification allowances. (4) In terms of evaluation, there were complaints and suggestions. It was concluded that several Islamic Religious Education teachers said that they were quite optimal in terms of staffing services, namely GPAI SMAN 2 Karawang, GPAI SMAN 3 Karawang and GPAI SMAN 5 Karawang. Meanwhile, those who stated that their staffing services were not optimal were GPAI SMAN 1 Telukjambe and GPAI SMAN 4 Karawang.

Keywords: *Personnel Services, Islamic Religious Education Teachers, Education Office*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang tertata hukumnya, setiap warga negara wajib mematuhi peraturan yang berlaku. Bila dikaitkan dengan permasalahan pelayanan publik maupun non publik di negara Indonesia dalam hal pelayanan masih menjadi masalah dalam birokrasi di Indonesia, karena dari beberapa faktor itu sendiri yang menyebabkan pelayanan belum menjadi acuan untuk menampung dan melaksanakan aspirasi dari para pelapor terhadap pelayanan.

Dalam perihal pelayanan, terdapat juga pelayanan yang dikhususkan untuk bidang kepegawaian. Pelayanan kepegawaian ini sebagai tahap dari serangkaian proses dan layanan yang diberikan oleh instansi atau organisasi kepada para pegawai untuk memenuhi kebutuhan administrasi, pengelolaan, dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kerja. Pelayanan kepegawaian juga merupakan sebagai tempat keluh kesah dan masukan pegawai kepada tempat pelayanan yang dituju.

Dalam pelaksanaan pelayanan kepegawaian, terdapat pelayanan administrasi, unit yang mengurus terkait pegawai di lembaga pendidikan. Beberapa komponen permasalahan penilaian ini terdiri dari komponen penyusunan formasi pegawai, penilaian kinerja, tata cara penjatuhan hukuman disiplin, mutasi pegawai, pelayanan administrasi kepegawaian, dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian.

Seperti para tenaga pendidik dari berbagai lembaga pendidikan, salah satunya yaitu Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI), diketahui guru agama yang diangkat oleh Departemen Agama merupakan guru yang mengajar di madrasah dan guru yang mengajar di sekolah umum berada di bawah manajemen Kementerian Pendidikan Nasional, tetapi dalam pembinaan profesionalisme dan kompetensinya dilakukan oleh Kementerian Agama. Masalah ini muncul ketika urusan pendidikan di desentralisasikan ke daerah kabupaten/kota, maka pengelolaan pun diserahkan kepada pihak pemerintah kabupaten/kota walaupun secara sentralistik dikelola oleh Kementerian Agama.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti akan meneliti terkait tata kelola pelayanan kepegawaian untuk Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) di Dinas Pendidikan, melalui skripsi ini yang berjudul "Implementasi Tata Kelola Pelayanan Kepegawaian Bagi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) SMA Kabupaten Karawang di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat".

METODE

Penelitian ini telah dilakukan pada bulan januari hingga bulan agustus 2023. Berlokasi di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat, yang beralamat di Jl. KK. Singawinata No. 57 Kabupaten Purwakarta. Metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bersifat kuanlitatif. Jenis data

kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka, yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data non numerik atau angka. Data ini biasanya berisi analisa kondisi saat ini pada organisasi sehingga membantu peneliti dalam menentukan permasalahan. Sedangkan sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah informan, tempat dan peristiwa dan dokumen.

Teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan pada penelitian ini adalah memakai triangulasi yang dimana menggunakan observasi, wawancara dan review dokumen (dokumentasi). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan beberapa langkah yaitu Data Collection (Pengumpulan Data), Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data) dan Conclusion Drawing / Verification (Kesimpulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hasil penelitian ini terdapat hasil analisis data berdasarkan paparan dan deskripsi hasil penelitian yang sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya terkait “ Implementasi Tata Kelola Pelayanan Kepegawaian Bagi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) SMA Kabupaten Karawang di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat.” Melalui hasil data observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah didapatkan.

Adapun beberapa hasil analisis data yang sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya terkait “ Implementasi Tata Kelola Pelayanan Kepegawaian Bagi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) SMA Kabupaten Karawang di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat.” ialah sebagai berikut:

Perencanaan Tata Kelola Pelayanan Kepegawaian bagi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) SMA Kabupaten Karawang di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat.

Kegiatan perencanaan merupakan proses awal dan arahan awal dari suatu kegiatan tata kelola pelayanan kepegawaian bagi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) SMA Kabupaten Karawang di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat sehingga pada akhirnya dapat mengetahui alasan dari terlaksananya tata kelola ini bisa mencapai suatu tujuan.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Siswanto perencanaan tersebut merupakan proses dasar dari terbentuknya suatu tujuan dan alasan atas keberadaan Guru Pendidikan Agama Islam pada Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat, dilihat dari faktor dan persyaratan yang sudah diketahui maka hal tersebut masuk dalam kategori perencanaan dengan mengetahui alasannya, ketika sudah diketahui alasannya mengapa hal tersebut bisa terjadi maka dapat dilanjutkan dengan fungsi manajemen selanjutnya.

Dari hasil temuan dalam penelitian mengenai implementasi tata kelola pelayanan kepegawaian bagi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) SMA Kabupaten Karawang di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat, dikatakan bahwa perencanaan yang terbentuk sesuai dengan arahan dari pusat yaitu pemerintah, bahwa adanya Guru Pendidikan Agama Islam SMA Kabupaten Karawang di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat merupakan alih kelola peraturan pemerintah daerah yang tercantum pada Undang-undang nomor 23 tahun 2014 yaitu lembaga pendidikan SMA, SMK dan SLB ditarik ke provinsi, jadi kewenangannya berada pada Dinas Pendidikan Jawa Barat. Secara otomatis lembaga pendidikan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan kewenangannya berada pada Dinas Pendidikan Jawa Barat.

Bagian perencanaan lain dari tata kelola pelayanan kepegawaian bagi Guru Pendidikan Agama Islam yang berstatus ataupun bersyarat bisa berada di bawah Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat ini, adalah karena Guru Pendidikan

Agama Islam (GPAI) berada pada 2 naungan yaitu Kemenag dan Kemendikbud, terkhusus yang berada di dinas Pendidikan mereka adalah pegawai daerah/PNS ataupun Non PNS yang mengajar di jenjang SMA pada mata pelajaran pendidikan Agama Islam memenuhi kualifikasi pendidikan yang sesuai, walaupun berada pada dinas pendidikan terkait masalah pengurusan sertifikasi tetap berada pada Kemenag. Dan juga mereka semua para Guru Pendidikan Agama Islam tetap berada dalam naungan dinas provinsi sesuai peraturan provinsi yang diterbitkan pada tahun 2016.

Pengorganisasian Tata Kelola Pelayanan Kepegawaian bagi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) SMA Kabupaten Karawang di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat.

Pengorganisasian merupakan kelengkapan dari sebuah perencanaan, di mana di dalam pengorganisasian ini dibentuk dan dibagi tiap tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan dalam bekerja sesuai pada bidangnya masing-masing, seperti menjalankan peran nya masing-masing dalam dunia pendidikan. Di dalam penelitian ini, peneliti mengkolaburasikan fungsi manajemen pengorganisasian dengan tata kelola pelayanan kepegawaian terkait sistem informasi yang digunakan untuk Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) SMA Kabupaten Karawang di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat.

Dapat disimpulkan bahwa sistem informasi untuk Guru Pendidikan Agama Islam ini sedikit berbeda dengan guru lainnya, adanya perbedaan dari layanan sistem informasi yang digunakan di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat ini, diketahui perbedaannya dimana sistem informasi untuk Guru Pendidikan Agama Islam berada pada dua naungan yaitu Kemenag dan Kemendikbud, untuk Kemenag memakai aplikasi Siaga sebagai absensi, pengelolaan sertifikasi dan informasi kegiatan lainnya, untuk Dinas Pendidikan sendiri menggunakan beberapa aplikasi yang sangat mumpuni dalam menunjang sistem tata kelola yang baik dan terintegrasi, yaitu dengan menggunakan aplikasi TRK, Kmob, dan Siap Jabar untuk Dinas Pendidikan.

Untuk aplikasi pertama, yaitu TRK (Tunjangan Remunerisasi Kinerja) dan selanjutnya untuk aplikasi kedua, yaitu aplikasi Kmob. (aplikasi absensi berbasis Android pegawai ASN) serta aplikasi ketiga, yaitu aplikasi Siap Jabar (Aplikasi pengelolaan data seluruh kepegawaian terkait administrasi, absensi, sertifikasi, penggajian, pangkat, keluarga dan tugas tiap divisi pegawai) Adapun aplikasi yang dipakai oleh Kementerian Agama untuk Guru Pendidikan Agama Islam di Dinas Pendidikan, yaitu aplikasi Siaga Pendis (Aplikasi pendataan untuk Guru Pendidikan Agama Islam yang memfasilitasi terkait absensi, pengelolaan sertifikasi, jika sudah mendapatkan sertifikasi maka dapat pula tunjangan sertifikasi dari pihak Kemenag)

Pelaksanaan Tata Kelola Pelayanan Kepegawaian bagi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) SMA Kabupaten Karawang di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat.

Pelaksanaan tata kelola pelayanan kepegawaian yang merupakan upaya sistematis dalam suatu proses untuk mencapai suatu tujuan yang meliputi hasil dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan atau evaluasi yang telah terlaksana. Dalam pelaksanaannya, tata kelola pelayanan kepegawaian bagi Guru Pendidikan Agama Islam melalui beberapa sistem informasi aplikasi sudah terlaksana dengan baik terkait layanan hasil data kepegawaian yang mencakup kenaikan gaji berkala, tunjangan tenaga pendidik, tunjangan pensiun serta cuti dan lain sebagainya.

Dari hasil wawancara dalam mengelola tunjangan kepegawaian bagi Guru Pendidikan Agama Islam SMA Kabupaten Karawang yaitu cukup sama rata akan tetapi dalam pendapatan berupa nominalnya dapat berbeda sesuai kriteria tenaga pendidik masing-masing. Adapun untuk tata kelola pelayanan kepegawaian bagi Guru Pendidikan Agama Islam SMA Kabupaten Karawang dilihat dari sertifikasi kompetensi mengajar yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, sehingga ketika mengajar Guru Pendidikan Agama

Islam diperbolehkan mengajar pada SMA, SMK dan SLB, karenanya jenjang tersebut berada pada provinsi maka semua tenaga pendidik yang mengajar di SMA, SMK dan SLB berada pada Dinas Pendidikan Jawa Barat.

Kemudian terkait tunjangan Guru Pendidikan Agama Islam ini terdapat pada SIMTUN (Sistem Tunjangan), untuk tunjangan bagi Guru Pendidikan Agama Islam sedikit berbeda dikarenakan sertifikasi di peroleh dari Kementrian Agama maka untuk tunjangan sertifikasi didapatkan dari Kementrian Agama juga, sedangkan tunjangan dari pihak Dinas Pendidikan bagi para Guru Pendidikan Agama Islam, tenaga pendidik akan mendapatkan hak pendapatan berupa gaji pokok, tunjangan fungsional, dan tambahan penghasilan pegawai (TPP), untuk mendapatkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) tersebut dilihat secara penilaian kinerja, yang nantinya mendapatkan tambahan dengan nominal yang berbeda-beda.

Dan untuk Guru Pendidikan Agama Islam yang berstatus guru honorer, mereka pun mendapatkan tunjangan juga berupa gaji insentif tiap bulannya yang akan diterima. Sehingga dari segi pelaksanaan ini terciptanya pelaksanaan tata kelola pelayanan kepegawaian bagi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) SMA Kabupaten Karawang di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat yang transparansi dan akuntabilitas.

Pengawasan Tata Kelola Pelayanan Kepegawaian bagi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) SMA Kabupaten Karawang di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat.

Dalam pengawasan tata kelola yang meliputi upaya monitoring berkala yang dilakukan dari sudut pandang pihak pelayanan kepegawaian di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat terhadap Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) dan juga sebaliknya dari sudut pandang Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) terhadap pelayanan kepegawaian di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat dalam melaksanakan tata kelola pelayanan kepegawaian sehingga dapat memberikan hasil yang diharapkan.

Dari sudut pandang pihak pelayanan kepegawaian di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat terhadap Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) ada beberapa hambatan, hal tersebut untuk selalu menghimbau para pegawai tenaga pendidik untuk selalu tertib data terkait kelengkapan data pegawai. Pada proses pengawasan tata kelola pelayanan kepegawaian bagi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) SMA Kabupaten Karawang di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat secara berkala yang dilakukan tentunya, ditemukan beberapa hambatan. Hambatan tersebut ialah tidak lengkapnya data, hal tersebut seringkali terjadi untuk sistem informasi aplikasi berbasis data, maka solusi daripada itu diharapkan untuk para pegawai agar selalu tertib data, untuk melengkapi kelengkapan berkas administrasi kepegawaian bagi para tenaga pendidik.

Sedangkan dari sudut pandang Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) terhadap pelayanan kepegawaian di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat, ada beberapa keluhan yang didapati diantaranya, lebih memberikan pelayanan dan kesejahteraan bagi Guru Pendidikan Agama Islam, belum optimalnya data sehingga masih banyak data yang tidak sesuai kebutuhan, dan administrasi yang cukup rumit karena ada pada dua pertanggung jawaban seperti absensi kepada Kemenag dan Dinas Pendidikan.

Banyaknya saran dari pihak Guru Pendidikan Agama Islam terhadap pelayanan kepegawaian di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat, diantaranya (1) Untuk lebih baik pelayanan nya dan kesejahteraan karena banyak Guru Pendidikan Agama Islam yang belum menjadi ASN. (2) Memberikan kesempatan untuk para Guru Pendidikan Agama Islam untuk ikut serta dalam sertifikasi (3) Memberikan ruang aspirasi untuk menyampaikan keluhan yang berhubungan dengan kondisi dilapangan dan juga. (4) Melakukan pendataan ulang kebutuhan Guru Pendidikan Agama Islam agar sesuai dengan sekolah di sekitar wilayah IV Jawa Barat. (5) Terkait sertifikasi Guru Pendidikan Agama Islam yang berada pada Dinas Pendidikan di sarankan agar sertifikasi oleh Dinas Pendidikan saja supaya lebih praktis karena cukup rumit untuk mengurusinya.

Dilihat dari beberapa keluhan dan saran yang disampaikan oleh para Guru Pendidikan Agama Islam, bisa diketahui beberapa dari Guru Pendidikan Agama Islam dapat memberikan pernyataan terkait sudah cukup optimal dan belum optimal, mereka yang menyatakan sudah cukup optimal merupakan (1) Guru Pendidikan Agama Islam SMAN 2 Karawang. (2) Guru Pendidikan Agama Islam SMAN 3 Karawang. (3) Guru Pendidikan Agama Islam SMAN 5 Karawang. Sedangkan mereka yang menyatakan belum optimal merupakan (1) Guru Pendidikan Agama Islam SMAN 1 Telukjambe. (2) Guru Pendidikan Agama Islam SMAN 4 Karawang.

Demikian fungsi manajemen pengawasan tata kelola pelayanan kepegawaian bagi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) SMA Kabupaten Karawang di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat, pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui proses audit kepegawaian yaitu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti tersebut yang dilakukan oleh auditor kepegawaian yang kompeten untuk mengetahui apakah dalam melaksanakan kebijakan peraturan perundang-undang di bidang pelayanan kepegawaian bagi Guru Pendidikan Agama Islam sudah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan terkait dengan Implementasi Tata Kelola Pelayanan Kepegawaian bagi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) SMA Kabupaten Karawang di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Perencanaan tata kelola pelayanan kepegawaian bagi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) SMA Kabupaten Karawang di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat, lembaga pendidikan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan kewenangannya berada pada Dinas Pendidikan Jawa Barat. Terkhusus untuk Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) berada pada 2 naungan yaitu Kemenag dan Kemendikbud. Untuk Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) yang berada pada Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat, mereka adalah pegawai daerah/PNS ataupun Non PNS yang mengajar di jenjang SMA pada mata pelajaran pendidikan Agama Islam memenuhi kualifikasi pendidikan yang sesuai, walaupun berada pada dinas pendidikan terkait masalah pengurusan sertifikasi tetap berada pada Kemenag.
2. Pengorganisasian tata kelola pelayanan kepegawaian bagi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) SMA Kabupaten Karawang di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi memiliki perbedaan yaitu sistem informasi untuk Guru Pendidikan Agama Islam berada pada dua naungan yaitu Kemenag dan Kemendikbud, untuk Kemenag memakai aplikasi Siaga sebagai absensi, pengelolaan sertifikasi dan informasi kegiatan lainnya, untuk Dinas Pendidikan sendiri menggunakan beberapa aplikasi yang sangat mumpuni dalam menunjang sistem tata kelola yang baik dan terintegrasi, yaitu dengan menggunakan aplikasi TRK, Kmob, dan Siap Jabar untuk Dinas Pendidikan.
3. Pelaksanaan tata kelola pelayanan kepegawaian bagi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) SMA Kabupaten Karawang di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat, terkait tunjangan Guru Pendidikan Agama Islam ini terdapat pada SIMTUN (Sistem Tunjangan), untuk tunjangan bagi Guru Pendidikan Agama Islam sedikit berbeda dikarenakan sertifikasi di peroleh dari Kementrian Agama. Sedangkan tunjangan dari pihak Dinas Pendidikan bagi para Guru Pendidikan Agama Islam, tenaga pendidik akan mendapatkan hak pendapatan berupa gaji pokok, tunjangan fungsional, dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) dengan nominal yang berbeda-beda. Dan untuk Guru Pendidikan Agama Islam yang berstatus guru honorer, mereka pun mendapatkan tunjangan juga berupa gaji insentif tiap bulannya yang akan diterima.
4. Pengawasan tata kelola pelayanan kepegawaian bagi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) SMA Kabupaten Karawang di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat, pada proses pengawasan tata kelola pelayanan kepegawaian terdapat beberapa

saran, yaitu: (1) Untuk lebih baik pelayanannya dan kesejahteraan karena banyak Guru Pendidikan Agama Islam yang belum menjadi ASN. (2) Memberikan kesempatan untuk para Guru Pendidikan Agama Islam untuk ikut serta dalam sertifikasi (3) Memberikan ruang aspirasi untuk menyampaikan keluhan yang berhubungan dengan kondisi dilapangan dan juga. (4) Melakukan pendataan ulang kebutuhan Guru Pendidikan Agama Islam agar sesuai dengan sekolah di sekitar wilayah IV Jawa Barat. (5) Terkait sertifikasi Guru Pendidikan Agama Islam yang berada pada Dinas Pendidikan di sarankan agar sertifikasi oleh Dinas Pendidikan saja supaya lebih praktis karena cukup rumit untuk mengurusinya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat, rahmat dan karunia serta mukzizat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal penelitian dengan judul "Implementasi Tata Kelola Pelayanan Kepegawaian bagi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) SMA Kabupaten Karawang di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat". Dengan selesainya jurnal ini, bukanlah menjadi sebuah akhir, melainkan suatu awal yang baru untuk memulai petualangan hidup yang baru. Penulis menyadari betul bahwa ada orang-orang yang berjasa dibalik selesainya jurnal ini. Tidak ada persembahan terbaik yang dapat penulis berikan selain rasa ucapan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu penulis.

Secara khusus, penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua dan keluarga penulis. Juga saya ucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Sayan Suryana, S.Sos.,MM. serta Bapak H. Ceceng Syarif Husein, MM., M.Pd. selaku dosen pembimbing yang telah sabar, meluangkan waktu, merelakan tenaga dan pikiran serta turut memberi perhatian dalam memberikan pendampingan selama proses penulisan jurnal ini.

Cukup banyak kesulitan yang penulis alami dalam penyusunan skripsi ini, tetapi berkat rahmat Allah SWT. dapat terselesaikan dengan baik. Akhir kata, penulis berharap semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga amal baik yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, S. (2008). *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Bumi Aksara.
- Amin, Moh. (1992). *Pengantar Ilmu Pendidikan Islam*. Garoeda Buana.
- Andriani, M. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar. *Jurnal Academia Praja, Volume 1, Nomor 2*.
- Arif, E. M. (2009). *Good Corporate Governance*.
- Barata, A. adya. (2004). *Dasar Dasar Pelayanan Prima*. PT Elex Media Komputindo.
- Creswell, J. W. (2008). *Educational Research, planning, conduting, and evaluating qualitative dan quantitative approaches*. Sage Publctions.
- Darajat, Z. (1996). *Ilmu Pendidikan Islam*. Bumi Aksara.
- Dkk, Z. (1983). *Metodik Khusus Pendidikan Agama*. Usaha Nasional.
- Fayol, H. (2010). *Management Public Relations*. PT Elex Media.
- Flippo, E. B. (1988). *Manajemen Personalia*. (T. M. Masud., Ed.; Keenam). Erlangga.
- Follet, M. Parker. (2007). *Manajemen*.
- Handoko, T. H. (2000). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia* (Edisi ke 2). BPF.
- Hasibuan, M. S. P. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu. S. P. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Huberman, M. dan. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press.
- Indonesia., L. A. N. R. (2007). *Pelayanan Publik, Akuntabilitas dan Pengelolaan Mutu*. Lembaga Administrasi Negara RI.

- Indonesia, R. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. *Bphn.Go.Id*, 2003(1), 3.
- Jogiyanto HM; Willy Abdillah; Sigit Suyantoro, F. I. (2011). *Sistem tatakelola teknologi informasi*. Andi.
- Kantor Bank Dunia Jakarta. (2013). *Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Kinerja Pendidikan* :
- Kasmir. (2017). *Customer Service Excellent: Teori dan Praktik*. PT Raja Grafindo Persada.
- Komara, E. (2019). Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) di Indonesia. *Mimbar Pendidikan*, 4(1), 73–84.
<https://doi.org/10.17509/mimbardik.v4i1.16971>
- Krina., L. L. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Sekretariat Good Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Makasudede, Y. (2010). *Bab 2 tinjauan pustaka*. 8–45.
- Moekijat. (1983). *Management Kepegawaian Dan Hubungan Dalam Perusahaan* (Cet ke-2).
- Moleong, L. J. (2006a). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2006b). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- MPR, T. (2003). Keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. *Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia*, 1x, 55.
- Muhaimin. (2012). *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhamad Sadi Is, S. H. I. M. H. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Karisma Putra Utama.
- Mulyadi. (2015). *Implementasi Organisasi*. Gadjah Mada Univercity Press.
- Napitupulu, P. (2007). *Pelayanan Publik dan Customer Stafication*. PT. Alumni.
- Negara, & Aparatur, K. M. P. (2004). Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. In Nomor 63/KEP/M.PAN/2/2004.
- Prasojo, & E., & Rudita., L. (2014). *Undang-Undang Aparatur Sipil Negara: Membangun Profesionalisme Aparatur Sipil Negara” dalam Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*. 8, 13–29.
- Rahim, A. (2016). Desentralisasi Pendidikan. *JOIES: Journal of Islamic Education Studies*, 1(1), 182–183.
- Ranupandojo;, H., & Husnan., S. (2004). *Manajemen Personalia*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. 1–104.
- Republik Indonesia, P. (2005). *UU 14-2005 Guru dan Dosen.pdf* (p. 17).
- Robbins, S. p. (1994). *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi* (Alih Bahasa Jusuf Udayana, Ed.). Arcan.
- Sedarmayanti. (2004). Membangun sistem manajemen kinerja guna meningkatkan produktivitas menuju good governance. In *Pdato Pengukuhan Guru besa di Universitas Unitono Surabaya* (p. 5).
- Siagian, S. P. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Silalahi, Ulber, & Gunarsa., A. (2009). *Metode penelitian sosial / Ulber Silalahi* (A. Gunarsa, Ed.). Refika Aditama.
- Silalahi, Ulber, & Gunarsa, A. (2009). *Metode penelitian sosial / Ulber Silalahi* (A. Gunarsa, Ed.). Refika Aditama.
- Siswanto. (2007). *Pengantar Manajemen* (PT. B. Aksara, Ed.).
- Soedaryono. (2006). *Tata Laksana Kantor*.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Suharjono. (2010). *Pengantar Pelayanan Prima bagi Tenaga Kependidikan di Perguruan Tinggi Negeri. Bahan Ajar*. Penataran Pelayanan Prima.

- Suryadharma Ali (Menteri Agama Republik Indonesia). (2010). Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010*, 7(2), 1–7.
- Tafsir, A. (2008). *Strategi Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Maestro.
- Terry, G. R. (1986a). *Azas-azas Manajemen*. Alumni.
- Terry, G. R. (1986b). *Azas-azas Manajemen*. Alumni.
- Terry, G. R., Rue, L. W., & Ticoalu, G. A. (2005). *Dasar-dasar Manajemen* (B. Aksara, Ed.).
- Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1974. (1974). Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001*, 2003(1).
- Widjaja, A. W. (1990). *Administrasi Kepegawaian* (Rajawali, Ed.).
- WIJAYA, A. W. (1986). *Administrasi Kepegawaian Suatu Pengantar*. Jakarta Rajawali.
- Yuliani, S. (2017). Pengaruh Pemahaman dan Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jawa Timur. *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhamadiyah, Vol. 1 No.*, 206.
- Zamzami, F. dkk. 2018. (2018). *Audit Internal, Konsep, dan Praktik (Sesuai International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing 2013)*. Gajah Mada University Press.